



**PUTUSAN
Nomor 1607/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

**BUT PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LLC (D/H BUT
PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD)**, beralamat di
Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Perkantoran Hijau Arkadia
Tower D & E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, yang
diwakili oleh Arif Syamsul Hadi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-3657/PJ/

2018, tanggal 16 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 551/B/PK/PJK/2018, tanggal 6 Maret 2018 *juncto* Putusan
Pengadilan Pajak Nomor Put-76843/PP/M.IIA/13/2016, tanggal 8 November
2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan



Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon Banding berhak untuk menggunakan tarif pajak yang ditetapkan dalam P3B antara Indonesia-United Kingdom dan oleh karenanya tarif PPh Pasal 26 ayat (4) yang dikenakan kepada Pemohon Banding adalah sebesar 10%; dan
- 2) bahwa harus dilakukan revisi perhitungan pajak yang dilakukan oleh Terbanding dan kemudian merevisi perhitungan tersebut menjadi **NIHIL** sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

No	Uraian	(USD)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	58,614,121.00
2.	PPh terutang	5,861,412.00
3.	Kredit Pajak	5,861,412.00
4.	PPh Kurang (Lebih) Bayar	Nihil
5.	Sanksi Administrasi	Nihil
6.	Jumlah PPh yang masih kurang dibayar	Nihil

- 3) bahwa meminta kepada Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi sebesar USD 8,674,890.00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76843/PP/M.IIA/13/2016, tanggal 8 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-113/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00007/204/06/09/11 tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00017/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 11 Januari 2012 dan kemudian telah dibetulkan kembali dengan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/WPJ.07/KP.1003/2013 tanggal 9 Januari 2013 atas nama : BUT. Pertamina Hulu Energi ONWJ Llc (d.h. BUT. Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd), NPWP: 01.000.396.0-081.000 (d.h. 01.000.396.0-091.000), alamat: Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 551/B/PK/PJK/2018, tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 30 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 551/B/PK/PJK/2018, tanggal 6 Maret 2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **BUT PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LLC (D/H BUT PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD)** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H.,M.H

ttd.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2019



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2019